

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum pengertian perusahaan adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang yang terlibat dalam menjalankan badan usaha dalam kapasitas komersial atau industri. Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif untuk memperoleh keuntungan. Salah satu indikator untuk menilai kualitas kinerja manajemen adalah kualitas laba. Dengan demikian, laporan laba yang dipublikasikan harus memiliki kualitas tinggi agar informasi tersebut menjadi lebih bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai acuan informasi pada investor dalam pengambilan keputusan investasi dana mereka.

Tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh laba. (Frysa, 2011:18 dalam Ummi, 2015), selain memperoleh laba, suatu perusahaan juga mempunyai tujuan jangka panjang diantaranya memberikan kemakmuran bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham dan memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham perusahaan.

Laba adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan dari hasil kegiatan usahanya. Laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk berbagai kepentingan, laba akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan tersebut atas jasa yang diperolehnya. Menurut (Dolok Saribu, 2019) *income* (laba)

adalah selisih yang diperoleh suatu perusahaan atas pendapatan dengan beban. Jika laba suatu perusahaan berkualitas baik perusahaan akan mendapatkan laba yang baik dan menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan karena pertimbangan kualitas laba yang baik merupakan cerminan dari suatu perusahaan dan jika laba perusahaan tidak berkualitas, hal itu dapat memiliki konsekuensi negatif seperti kerugian kepercayaan investor, menurunkan kepercayaan publik dan dapat merusak reputasi perusahaan.

Kualitas laba merupakan indikator yang sering digunakan dalam menilai kinerja perusahaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan, Serta menjadi perhatian oleh para *stakeholder*. Kualitas laba memiliki potensi informasi yang sangat penting bagi pihak eksternal pada suatu perusahaan karena Kualitas laba merupakan kemampuan laba terkini untuk menyediakan sebuah gambaran nyata tentang perusahaan dan kemampuannya untuk bertahan dimasa depan. (Dechow,1884 dalam Hamdan *et al*,2013) Signifikan kualitas laba berasal dari laba yang dimana banyak pihak yang bergantung ketika mereka membuat keputusan mereka.

Fenomena dari teori keagenan (*agency theory*) mengidentifikasi adanya perbedaan kepentingan antara pihak internal dan pihak eksternal yang dapat mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan laporan keuangan. Masalah keagenan muncul karena keberadaannya sebagai agen lebih banyak mengetahui pengelolaan informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Permasalahan timbul ketika kedua

belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang digunakan prinsipal untuk memberikan insentif kepada agen.

Langkah yang digunakan dalam rangka untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan, maka diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif dapat mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda.

Tugas komite berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Komite audit mulai diwajibkan untuk dibentuk di setiap perusahaan sejak tahun 2001 melalui Surat Edaran BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) No.SE-03/PM/2000 yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap emiten dan Surat Direksi BEJ (Bursa Efek Jakarta) No.Kep.339/BEJ/07-2001 mengenai kewajiban perusahaan tercatat untuk memiliki komite audit serta jumlah keanggotaan dari komite itu sendiri. Pada tahun 2003, keberadaan komite audit untuk BUMN terdapat dalam Keputusan Menteri BUMN No.Kep.117/M-MBU/2002 yang berisi tugas komite audit untuk membantu dewan komisaris.

Menurut (Arief Effendi, 2016) Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan direksi dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit

dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab langsung kepada dewan komisaris. Peran komite audit sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan.

Komite audit di dalam perusahaan akan berperan untuk membantu tugas dewan komisaris dalam hal mengawasi, mengontrol, dan mininjau kegiatan manajemen perusahaan terkait hasil keuangan perseroan dan informasi keuangan lainnya, kepatuhan terhadap peraturan perseroan, efektivitas kegiatan dan kontrol internal perusahaan, serta kemampuan perseroan untuk mengelola risiko dan menangani keluhan konsumen. Tugas komite audit berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Melakukan penilaian terhadap efektifitas kinerja komite audit, terdapat beberapa karakteristik komite audit yang bisa digunakan sebagai parameter kinerja.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Bab II pasal (4) menyebutkan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan dibatasi sampai 5 orang anggota, 2

orang diantaranya merupakan pihak independen. Ukuran komite audit diukur dengan menggunakan skala rasio, yaitu dengan menghitung jumlah anggota komite audit yang tercantum dalam laporan perusahaan tersebut.

Komite audit independen adalah anggota dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan langsung kepada perusahaan. Independensi komite audit dilihat dari seberapa banyak anggota komite audit yang berasal dari pihak luar yang tidak memiliki hubungan dengan pihak perusahaan. Dalam keputusan ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012, dinyatakan bahwa “Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan komite audit diketuai oleh Komisaris Independen”. Keberadaan komite audit yang cukup independen dapat membantu dalam mengurangi aktivitas Kualitas laba. Independensi komite audit diukur dengan menggunakan skala rasio. Semakin tinggi independensi komite audit maka kualitas pelaporan keuangan akan semakin baik.

Rapat dan pertemuan komite audit sangat penting bagi keberhasilan kerja komite audit. Menurut keputusan ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012, komite audit mengadakan pertemuan secara berkala paling tidak 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan dalam 1 periode kerja komite audit. Rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota. Jumlah rapat komite audit diukur dengan menggunakan skala rasio, yaitu dengan menghitung jumlah rapat yang dilakukan komite audit dalam periode satu tahun. Semakin sering komite audit melakukan pertemuan maka

semakin efektif dalam mengawasi manajemen agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingannya sendiri.

Penelitian mengenai karakteristik komite audit telah banyak dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian (Ricky, Rilo M M Laskito, 2017) membuktikan bahwa ukuran komite audit dan independensi komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laba. (Pebriani, 2022) menyatakan ukuran komite audit, independensi komite audit, dan jumlah rapat komite audit pada perusahaan perbankan tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laba. Penelitian oleh Elianna (2015) menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba, jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba, independensi komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba.

Berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan hasil yang ditunjukkan oleh peneliti terdahulu menjadi perhatian penulis untuk meneliti kembali namun pada konteks sub sektor makanan dan minuman, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul, **“PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP KUALITAS LABA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di sub bab sebelumnya, masalah yang akan diteliti adalah terkait dengan Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Kualita Laba. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba?
2. Apakah independensi komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba ?
3. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba ?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ?

1. Menguji serta menganalisis pengaruh signifikan ukuran komite audit terhadap kinerja perusahaan.
2. Menguji serta menganalisis pengaruh signifikan independensi komite audit terhadap kualitas laba.
3. Menguji serta menganalisis pengaruh signifikan jumlah rapat komite audit terhadap kualitas laba.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai karakteristik komite audit dan pengaruhnya terhadap kualitas laba. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai karakteristik komite audit terhadap kualitas laba serta dapat menjadi acuan untuk penelitian sejenis lainnya kedepan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai acuan dalam menilai suatu informasi kualitas laba yang berkualitas melalui penyajian informasi yang lebih tepat waktu.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi para manager sebagai bahan analisis terhadap mengambil kebijakan penerapan karakteristik komite audit.

3. Universitas HKBP Nommensen

Menjadikan penelitian ini sebagai pedoman bagi mahasiswa yang akan mengerjakan skripsi untuk menjadi lebih baik dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI & HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Telaah Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Penelitian mengenai komite audit ini dilandasi oleh *agency teori* (teori agensi). Teori keagenan menjelaskan dan memprediksi perilaku dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan. (Adanan & Berliana, 2019) mengemukakan bahwa Teori keagenan didasarkan pada hubungan antara pemilik (*Principal*) dan manajemen (*Agent*). *Principal* melimpahkan kewenangan untuk mengelola perusahaan kepada agen. Secara legal, agen merupakan individu atau personel yang dipekerjakan untuk mewakili kepentingan pihak lain.

Dalam *agency theory*, adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik. Terjadinya konflik yang disebut *agency conflict* disebabkan karena pihak-pihak yang terkait yaitu *principal* (yang memberi kontrak atau pemegang saham) dan *agen* (yang menerima kontrak dan yang mengelola dana parsial) mempunyai kepentingan yang saling bertentangan.

Agency teori memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Jika *agent* dan *principal* berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka ada alasan untuk percaya bahwa *agent* tidak selalu

bertindak sesuai keinginan *principal*. Untuk mengurangi terjadinya tindakan atau konflik yang terjadi perusahaan membentuk Komite Audit.

Konflik keagenan dapat terjadi antara pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda akan menyulitkan dan menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif sehingga menghasilkan nilai untuk perusahaan itu sendiri dan juga sebagai *stakeholders*. Pihak pemilik menginginkan laba yang sebesar-besarnya. Sehingga, kedua pihak ini akan terjadi konflik karena adanya perbedaan tujuan. *Principal* menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya dan investasi, yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki.

Akibat perbedaan kepentingan inilah, masing-masing pihak (*prinsipal* dan *agen*) berusaha memperbesar keuntungan bagi dirinya sendiri. *Principal* menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi, yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki. *Agent* menginginkan kepentingannya diakomidir dengan pemberian kompensasi yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. *Principal* menilai potensi *agent* berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Semakin tinggi tingkat laba, harga saham dan tingkat pengembalian deviden juga akan semakin tinggi pula.

Pada kondisi ini, maka *agent* dianggap berhasil dan berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi. Sebaliknya, *agent* pun memenuhi tuntutan *principal* agar mendapatkan kompensasi yang tinggi. Sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai maka *agent* dapat memainkan beberapa kondisi

perusahaan agar seolah-olah target tercapai. Permainan tersebut bisa terjadi atas prakarsa dari prinsipal maupun inisiatif agent sendiri. Maka terjadilah akuntansi yang menyalahi aturan seperti adanya piutang yang tidak mungkin tertagih yang tidak dihapuskan, kapitalisasi biaya yang tidak semestinya atau pengakuan penjualan yang tidak semestinya. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan melakukan income smoothing (membagi keuntungan ke periode lain) agar setiap tahun, perusahaan kelihatannya meraih keuntungan, padahal kenyataannya rugi.

2.1.2 Kualitas Laba

Kualitas laba merupakan aspek penting didalam menilai suatu kesehatan laporan keuangan perusahaan. Menurut Wulansari (2013), kualitas laba merupakan kualitas informasi laba yang tersedia untuk publik yang mampu menunjukkan sejauh mana laba dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan. Kualitas laba adalah penilaian sejauh mana suatu laba dapat diperoleh berulang-ulang, dapat dikendalikan, dan dapat menggambarkan profitabilitas perusahaan secara nyata. sedangkan laba mendatang merupakan indikator kemampuan membayar deviden masa mendatang.

Laba dengan kualitas yang rendah tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen pada periode tersebut sehingga dapat menyesatkan pihak pengguna laporan. Jika laba dengan kualitas yang rendah tersebut digunakan oleh investor untuk membentuk nilai pasar perusahaan, maka laba tersebut tidak dapat menunjukkan nilai pasar perusahaan sebenarnya.

Terdapat beberapa hal dalam penentuan kualitas laba :

1. Persisten

Laba yang berkelanjutan, laba yang dihasilkan menunjukkan kualitas yang baik apabila laba tersebut dapat dihasilkan terus menerus dan bukan karena suatu kejadian tertentu pada saat tertentu. Contoh laba yang dihasilkan dari tingginya pendapatan kegiatan utama perusahaan akan lebih berkualitas dari laba yang diperoleh akibat tingginya pendapatan lain-lain yang hanya muncul pada saat tertentu.

2. Kedekatan laba dengan aliran kas operasional

Dapat diukur dengan rasio kas operasi dengan laba, semakin dekat laba dengan kas operasi menunjukkan laba yang semakin berkualitas.

3. Estimasi, pertimbangan, dan prediksi

Semakin banyak estimasi yang diperlukan oleh penyusun laporan keuangan dalam penerapan standart pelaporan maka semakin rendah kualitas laba.

4. Manajemen laba

Keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan manajemen akan mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba. Semakin besar manajemen laba yang dilakukan maka semakin rendah kualitas laba. Contoh apabila manajemen mengakui biaya-biaya pada periode lalu dimana penjualan sedang turun maka pada periode selanjutnya pengakuan biaya akan lebih kecil sehingga laba pada periode selanjutnya seolah-olah akan terlihat lebih tinggi dari periode sebelumnya.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai pengguna laporan keuangan perlu melihat lebih dalam mengenai laba yang dihasilkan

apakah memiliki kualitas yang baik agar perusahaan dapat menilai kinerja manajemen yang sesungguhnya dan dapat mengambil keputusan ekonomik yang tepat.

Karakteristik Kualitas Laba

Menurut Warianto dan Rusiti (2013), laba yang berkualitas merupakan laba yang memiliki 3 karakteristik berikut ini :

1. Mampu mencerminkan kinerja operasi perusahaan saat ini dengan akurat
2. Mampu memberikan indikator yang baik mengenai kinerja perusahaan di masa depan
3. Dapat menjadi ukuran yang baik untuk menilai kinerja perusahaan

Dalam mengukur kualitas laba dalam penelitian ini menggunakan Salah satu pengukuran kualitas laba adalah dengan menggunakan pendekatan *discretionary accrual*. Christiani dan Yeterina (2014) dalam Marlisa dan Siti (2016) menjelaskan Konsep model akrual memiliki dua komponen yaitu *discretionary* dan *non-discretionary accrual*. *Discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan manajerial, sementara *non discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang tidak dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ramadriani (2017) *Discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang berada dalam kebijakan manajemen artinya manajer memberikan intervensinya dalam proses pelaporan keuangan. Dengan demikian dapat dikatakan kualitas laba yang diukur dengan *discretionary accrual* dianggap lebih baik untuk mengukur manajemen laba. Pada penelitian ini digunakan Model Modifikasi Jones dalam mendeteksi

manajemen laba. Dechow dkk (1995) menguji berbagai alternative model akrual dan mereka menyatakan bahwa model modifikasi Jones adalah model yang paling baik untuk menguji manajemen laba.

Dengan penyampaian diatas, berikut rumus *Discretionary accrual (DA)*:

$$\text{DACT} = \frac{\text{TAit}}{\text{Ait}} - \text{NDAit}$$

2.1.3 Konsep *Corporate Governance*

Menurut (Agoes, 2013), *corporate governance* merupakan Sistem tata kelola yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan *corporate governance* dilakukan oleh seluruh pihak dalam perusahaan, dengan aktor utamanya adalah manajemen puncak perusahaan yang berwenang untuk menetapkan kebijakan perusahaan dan menerapkan kebijakan tersebut.

Corparet governance merupakan konsep yang berlandaskan pada teori keagenan yang mempunyai tujuan sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor mengenai penerimaan return atas dana yang telah diinvestasikan.

Adapun *corporate governance* sendiri merupakan konsep yang diajukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui *supervise* dan *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen kepada stakeholder dengan berlandaskan pada kerangka peraturan. Sistem yang dijalankan disesuaikan dengan pengaturan dan pengendalian perusahaan disusun oleh pihak-pihak

tersebut. Pemegang saham dengan kepentingan internal dan eksternal saling berkaitan melalui hak dan kewajiban yang harus mereka jalani.

2.1.2.1 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus memastikan azas *corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Sehubungan dengan itu, *Organization for economic Co-Operation and Development (OECD)* merumuskan empat unsur penting dalam *corporate governance* sebagai berikut:

1. Keadilan (*Fairness*)

Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor

2. Transparansi (*Transparancy*)

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat dibandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Menjelaskan peran dan tanggungjawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana yang diawasi Dewan Komisaris.

4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

2.1.4 Komite Audit

Pengertian komite audit dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengeluarkan Edaran Nomor 32/SEOJK.04/2015 pada tanggal 17 November 2015 mengenai pengertian komite audit, yaitu komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi efektivitas dewan komisaris. Komite audit dapat dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan.

Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan penelaahan sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektifitas fungsi audit. Laporan keuangan merupakan produk dari manajemen yang kemudian diverifikasi oleh auditor eksternal. Komite audit memiliki wewenang mengakses laporan audit internal dan laporan-laporan lain yang diperlukan, melakukan komunikasi langsung dengan auditor internal maupun eksternal. Dalam pola hubungan tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara Perusahaan dengan eksternal auditor. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Komite audit diangkat oleh komisaris untuk masa jabatan yang sama dengan komisaris.

Beberapa ketentuan Komite Audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret,2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit
- b. Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit, sebagaimana diperbaharui dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- c. Kep. 339/BEJ/2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit
- d. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit
- e. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit

(Hartono & Nugrahanti, 2014) mengungkapkan bahwa komite audit ialah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip GCG terutama transparansi dan *disclosure* yang diterapkan secara konsisten dan memadai.

Bursa Efek Indonesia melalui Kep. Direksi BEJ No. Kep315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau

penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Peran komite audit sangat penting karena dapat mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep103/MBU/2002, dalam membantu Komisaris/Dewan Pengawas, Komite Audit bertugas:

- a. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
- c. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast* dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas.

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Struktur Komite Audit di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 117 tahun 2002 untuk perusahaan BUMN dan untuk perusahaan publik diatur dalam Keputusan BEJ dan Peraturan Bapepam yang relevan. Ketentuan mengenai Struktur Komite Audit menurut Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai ketua Komite Audit. Dalam hal ini Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Apabila Komite Audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, Komite Audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja. Laporan yang dibuat dan disampaikan Komite Audit kepada komisaris utama adalah:

1. Laporan triwulan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan bersangkutan.
2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit.

3. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh dewan komisaris.

Dalam laporan Komite Audit kepada dewan komisaris, Komite Audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang temuan mereka yang berhubungan dengan peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap masalah pengunduran diri, penggantian dan pemberhentian perikatannya, kesimpulan tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit internal, serta kesimpulan atas kinerja sistem kontrol internal.

Rapat Komite Audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota Komite Audit dalam mengawasi proses *corporate governance*, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*, memonitor bahwa perusahaan tunduk pada *code of conduct*, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial atau *non-finansial* perusahaan, memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya.

2.1.4.1 Karakteristik Komite Audit dan hubungannya dengan Kualitas Laba

Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari komite audit yang mencakup:

1. Ukuran Komite Audit

Komite audit harus melaksanakan rapat dengan jumlah tertentu agar komite audit tersebut dikatakan efektif. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Bab II Pasal (4) menyebutkan bahwa : “Komite audit paling

sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik”. Jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan dibatasi sampai 5 orang anggota, 2 orang diantaranya merupakan pihak independen (IKAI). Ukuran komite audit merupakan salah satu karakteristik komite audit yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Semakin besar ukuran komite audit maka semakin efektif fungsi pengawasan komite audit terhadap pihak manajemen sehingga kualitas pelaporan keuangan akan lebih terjamin. Ukuran komite audit dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Komite Audit} = \text{Jumlah Komite Audit}$$

2. Independensi Komite Audit

Independensi adalah salah satu kunci yang harus dimiliki oleh anggota komite audit. Komite audit independen adalah anggotan dari pihak independen yang tidak memiliki hubungan langsung kepada perusahaan. Apabila komite audit terdiri dari anggota yang independen, maka akan terhindar dari benturan kepentingan dalam perusahaan. Dalam standar profesional akuntan publik, standart umum kedua berbunyi: “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Komite audit yang independen cenderung untuk bekerja lebih efektif karena tidak berpihak kepada pihak manapun termasuk pihak manajemen,

sehingga hasil tinjauannya lebih tepat dalam menggambarkan kondisi perusahaan dan hasil dari tinjauan tersebut dapat menghasilkan laporan yang nantinya akan digunakan oleh *principal* untuk pengambilan keputusan perusahaan. Komite audit yang independen memiliki kemampuan untuk mengevaluasi secara objektif laporan keuangan dan kebijakan perusahaan. Jika komite audit independen, mereka lebih cenderung mengidentifikasi dan mengurangi risiko kesalahan atau penipuan dalam laporan keuangan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas laba dengan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan secara akurat kinerja dan posisi keuangan perusahaan.

Indenpendensi komite audit diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indenpendensi Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit Independen}}{\text{Jumlah anggota komite audit}}$$

3. Jumlah rapat komite audit

Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Rapat komite audit diadakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri minimal dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota. Setiap rapat komite audit dituangkan didalam surat edaran rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada dewan komisaris. Semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka diharapkan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dapat semakin baik dan

mengevaluasi kebijakan yang diambil dewan direksi. Oleh karena itu pihak manajemen tidak dapat melakukan kegiatan manajemen laba.

Chen et al.(2006) menyatakan bahwa dewan yang lebih sering mengadakan pertemuan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan, karena pertemuan yang rutin memungkinkan dewan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah potensial, terutama yang terkait dengan kualitas pelaporan keuangan. Namun Prastiti (2013) menemukan hasil sebaliknya bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh dengan adanya kegiatan manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Rapat Komite Audit} = \text{Jumlah Pertemuan anggota komite audit dalam 1 tahun}$$

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Radianti (2014) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Adopsi IFRS Terhadap Kualitas Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan memperoleh 45 perusahaan sebagai sampel penelitian, maka dari itu selama tiga tahun pengamat terdapat 135 laporan tahunan dianalisis. Metode analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba, komite audit independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba, sedangkan adopsi standar akuntansi berbasis IFRS tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. .

Ricky Rio M (2017) dalam penelitiannya mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap kualitas laba. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit independensi komite audit, jumlah rapat komite audit dan tenure atau masa jabatan komite audit sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas laba. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran dan independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba, Jumlah rapat berpengaruh positif terhadap kualitas laba, yang dimana rapat yang semakin sering akan mengacu kepada selesainya masalah yang ada didalam perusahaan secara lebih cepat dan tenure komite audit berpengaruh negatif terhadap kualitas laba.

Anissa Amalia Mulya (2014) dalam penelitiannya mengenai pengaruh ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kualitas laba (studi empiris pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2008-2012). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas laba. Hasil penelitian ini bahwa secara parsial kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba selain itu variabel kepemilikan instiusional juga ditemukan berpengaruh terhadap kualitas laba sedangkan ukuran komite audit dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laba. Secara simultan ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kualitas laba.

Mawar Pebriani (2022), dalam penelitiannya mengenai Pengaruh karakteristik komite audit terhadap kualitas laba studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi BEI dan analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan pengolahan data maka dapat diperoleh dari hasil penelitian bahwa ukuran komite audit, independensi komite audit, dan jumlah rapat komite audit pada perusahaan perbankan tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laba. Hal ini terjadi karena adanya penambahan yang tidak cocok dalam ukuran komite audit pada beberapa perusahaan yang mengarah pada sebuah pengurangan keefektifan aktivitas komite audit karena membuang biaya dan menimbulkan kekacauan dalam pekerjaan.

Selanjutnya (Chandra et al., 2021) dalam penelitiannya mengenai pengaruh independensi auditor dan komite audit terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Variabel dependen dalam penelitian adalah kualitas laba dan variabel independen meliputi independensi auditor dan komite audit serta variabel intervening adalah kualitas audit. Penelitian ini menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak memediasi pengaruh independensi auditor dan komite audit terhadap kualitas laba. Penelitian menemukan pengawasan yang dilakukan oleh auditor independen dan audit yang berkualitas dapat menghambat manajemen laba sehingga meningkatkan kualitas laba

2.3 Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

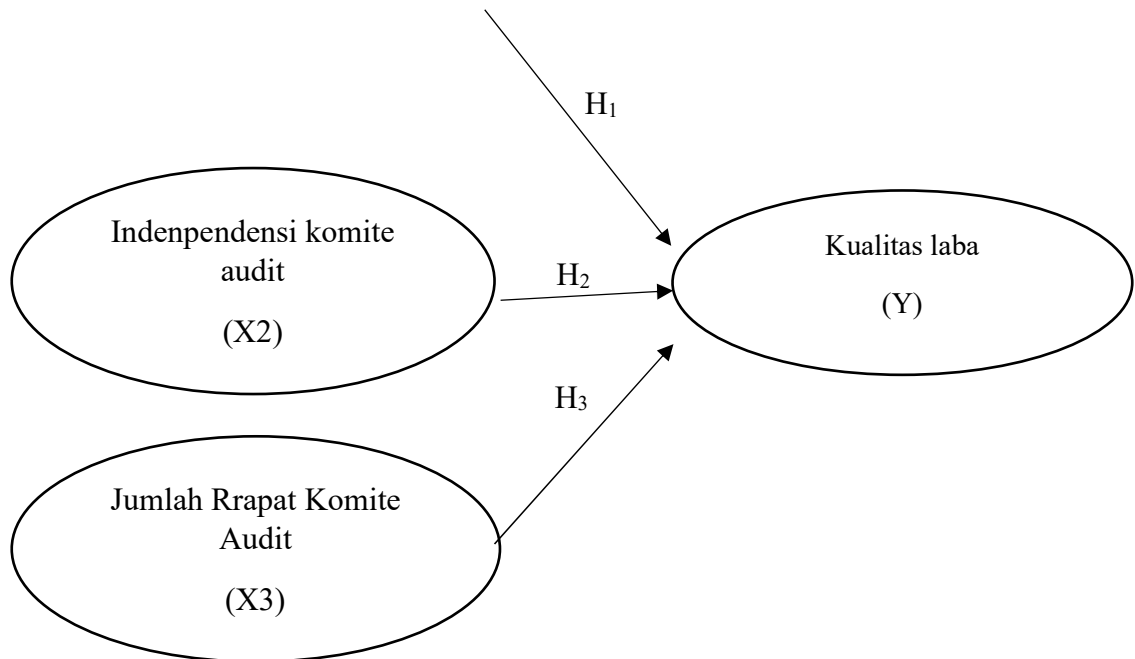
2.3.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Menurut Notoatmodjo (2018), kerangka teori merupakan gambaran dari teori dimana suatu riset berasal atau dikaitkan. Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoritis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.



Ukuran Komite audit

(X1)



Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

Sumber : Diolah oleh Penulis (2023)

2.3.2 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatan sementara, karena jawaban yang baru diberikan berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan oleh fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (sekaran & Bougie,2017).

Hipotesis dari penelitian ini diduga Koefisien respon laba perusahaan yang membentuk komite audit yang memenuhi syarat lebih besar daripada koefisien respon laba perusahaan yang tidak membentuk komite audit.

1. Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Kualitas Laba.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit Bab II pasal (4) menyebutkan bahwa : “Komite audit paling sedikit terdiri dari tiga (3) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik”. Semakin besar ukuran komite audit maka semakin efektif fungsi pengawasan komite audit terhadap pihak manajemen.

Komite audit yang lebih besar lebih baik dalam mengawasi persiapan laporan keuangan dan memperbaiki kualitas laba (Lin & Yang, 2006 dalam Hamdan *et al*, 2013). Ukuran komite audit secara positif berhubungan dengan kualitas laporan keuangan (Hamdan & Mustaha, 2011 ; Felo *et al*, 2003 dalam Hamdan *et al*, 2013) ukuran juga membantu mengurangi dan pemalsuan dalam laporan keuangan (Huang, 2005 dalam Hamdan *et al*, 2013). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba.

2. Pengaruh Independensi komite audit terhadap kualitas laba

Independensi komite audit pada dasarnya memastikan pelaporan keuangan yang lebih berkualitas, karena semakin independen anggota komite audit maka semakin memungkinkan suatu laporan keuangan untuk bisa dipercaya. Komite audit yang independen cenderung untuk bekerja lebih efektif karena tidak berpihak kepada pihak manapun termasuk pihak manajemen, sehingga hasil tinjauannya lebih tepat dalam menggambarkan kondisi perusahaan dan hasil dari tinjauan tersebut dapat menghasilkan laporan yang nantinya akan digunakan oleh *principal* untuk pengambilan keputusan perusahaan.

Rahmat Radianti (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa secara simultan independensi komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Menurut Hassan (2013) komite audit yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan memenuhi berbagai tanggungjawab termasuk, memberi komentar dan menyetujui kebijakan akuntansi, meninjau laporan keuangan, dan memelihara serta menelaah kecukupan pengendalian internal. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu :

H₂ : Independensi komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba.

3. Pengaruh Jumlah rapat komite audit terhadap kualitas laba

Rapat komite audit pada dasarnya bertujuan untuk mengontrol jalannya perusahaan dan mendiskusikan serta menyelesaikan permasalahan dalam

perusahaan. Dengan adanya rapat atau pertemuan yang rutin dari komite audit, maka principal jadi mengetahui bagaimana kerja dari manajemen dan kondisi perusahaan terkini.

Berdasarkan keputusan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit menyebutkan bahwa komite audit harus mengadakan rapat secara berkala minimal tiga bulan sekali atau empat kali dalam satu tahun.

Ricky Rilo dan Herry Laksito (2017) dalam penelitiannya membuktikan bahwa jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laba. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa komite audit yang aktif melakukan pertemuan secara teratur maka dalam fungsi pengawasannya akan lebih baik dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H₃ : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu. Menurut Sugiyono (2019:2) “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, Menurut Sugiyono (2017:8) “Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda karena variabel bebasnya terdiri lebih dari satu. Variabel yang mempengaruhi disebut variabel independen (bebas) dan variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen (terikat). Penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas yaitu ukuran komite audit (X1), independensi komite audit (X2) dan jumlah rapat komite audit (X3), sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas laba (Y).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018 : 130) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2019-2021 didalam penelitian terdapat 30 perusahaan.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2018: 131) sampel penelitian adalah faktor dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel perusahaan adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel dengan beberapa kriteria tertentu. Kriteria sampel meliputi hal-hal berikut.

1. Sampel adalah perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI yang memperoleh laba pada periode 2019-2021.
2. Laporan keuangan tahunan selama periode penelitian (*financial statement*).
3. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2019-2021 yang memiliki Laba bersih dan arus kas operasi bersih.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan diatas, maka terdapat perusahaan yang memenuhi kriteria, untuk selanjutnya akan dijadikan sampel dalam pengujian terhadap variabel-variabel yang digunakan.

Tabel 3.1 Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah Perusahaan sub sektor makanan dan minuman	42
Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel	16
Perusahaan yang memenuhi kriteria dan digunakan sebagai sampel	28

Sumber : www.idx.co.id

Tabel 3.2 Nama-Nama Sampel Penelitian

NO	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	AISA	PT Tiga pilar sejahtera food tbk
2	ADES	PT Akasha Wira International Tbk
3	ALTO	PT Tri banyan tirta tbk
4	BTEK	PT Bumi teknokultura unggul tbk
5	BUDI	PT Budi Strach & Sweetener Tbk
6	CAMP	PT Campina Ice Cream Industry Tbk
7	CEKA	PT Wilmar cahaya indonesia tbk
8	CLEO	PT Sariguna Primatirta Tbk
9	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk
10	DMND	PT Diamond Food Indonesia Tbk
11	FOOD	PT Sentra food indonesia tbk
12	GOOD	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk

13	HOKI	PT Buyung Poetra Sembada Tbk
14	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
15	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
16	IKAN	PT PT Era Mandiri Cemerlang Tbk
17	KEJU	PT Mulia Boga Raya Tbk
18	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
19	MYOR	PT Mayora Indah Tbk
20	PANI	PT Pratama abadi nusa industri tbk
21	PCAR	PT Prima cakrawala abadi tbk
22	PSDN	PT Prasadha aneka niaga tbk
23	ROTI	PT Nippon Indosari Carpindo Tbk
24	SKBM	PT Sekar bumi tbk
25	SKLT	PT Sekar Laut Tbk
26	STTP	PT Siantar Top Tbk
27	TBLA	PT Tunas Baru Lampung Tbk
28	ULTJ	PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk

Sumber : www.idx.co.id

3.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai adalah data sekunder, berupa data-data laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021 yang diperoleh dari pihak kedua atau tangan kedua.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2021 yang diperoleh dari internet dengan mengunduh laporan keuangan melalui situs www.idx.co.id.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu :

a. Metode Dokumentasi

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2021. Laporan keuangan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah dipublikasikan pada *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.

b. Metode Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan mempelajari literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel operasional variabel adalah penarikan batasan yang menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantif dari suatu konsep. Tujuannya supaya

peneliti dapat mencapai suatu tolak ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah didefinisikan konsepnya, maka peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi gejala atau variabel yang ditelitinya.

a. Variabel independen

Variabel independen, sering disebut juga sebagai variabel bebas, variabel yang mempengaruhi. Menurut (Ulfa, 2019) Variabel bebas juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau nilai yang jika muncul maka akan memunculkan (mengubah) kondisi atau nilai yang lain. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu karakteristik komite audit. Ukuran komite audit, Independensi komite audit dan Jumlah rapat komite audit. Mengenai variabel-variabel tersebut berikut penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ukuran komite audit

Berdasarkan Kep-643/BL/2012, komite audit pada perusahaan publik, setidaknya terdiri dari 3 orang anggota. Dari 3 orang anggota tersebut, diketuai oleh 1 orang yang merupakan bagian dari dewan komisaris independen perusahaan dan 2 orang lainnya merupakan anggota yang berasal dari eksternal independen. Menurut (Pertiwi & Husaini, 2021) Ukuran dewan yang lebih besar akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mencari anggota dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan menjadi terlibat dalam komite-komite yang dibentuk dewan komisaris. Dalam penelitian ini, Perusahaan harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki komite auditnya karena karakteristik ini akan memengaruhi komite audit

dalam memberikan pendapat profesional kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Ukuran komite audit dalam penelitian ini diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit suatu perusahaan.

$$\text{Ukuran Komite Audit} = \text{Jumlah komite audit}$$

2. Independensi komite audit

Independensi komite audit merupakan keadaan dimana anggota komite audit harus bebas dari setiap kewajiban dan tidak memiliki suatu kepentingan tertentu terhadap perusahaan atau direksi dan komisaris perusahaan bersangkutan serta bebas dari keadaan yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan sikap independensinya.

Menurut (Amin, 2016) komite audit yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan memenuhi berbagai tanggungjawab termasuk, memberi komentar dan menyetujui kebijakan akuntansi, meninjau laporan keuangan, dan memelihara serta menelaah kecukupan pengendalian internal. Komite audit independen dapat mendorong kualitas laporan keuangan dan meningkatkan keinformatifan laporan keuangan. Komite audit independen memiliki lebih banyak motivasi dan keahlian untuk mengurangi perilaku fraud dan mengurangi penyesatan laporan keuangan sehingga dapat menjamin kepentingan pemegang saham serta kualitas informasi keuangan. Independensi komite audit diukur dari proporsi jumlah anggota yang berasal dari luar perusahaan dengan jumlah anggota komite audit.

$$\text{Independensi Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit indenpenden}}{\text{Jumlah anggota komite audit}}$$

3. Jumlah rapat komite audit

Variabel rapat komite audit diukur dengan menghitung jumlah keseluruhan rapat yang telah dilaksanakan antar anggota komite audit dalam waktu setahun). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, anggota komite audit diwajibkan untuk mengadakan pertemuan/rapat 3-4 kali dalam satu tahun. Hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Menurut (Pertiwi, 2021) Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*, memonitor bahwa perusahaan atuh pada *code of conduct*, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin data mempengaruhi kinerja keuangan atau non-keuangan perusahaan, memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku dan mengharuskan auditor eksternal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya. Pada penelitian ini jumlah pertemuan komite audit dihitung dengan jumlah rapat dalam satu tahun.

$$\text{Jumlah Rapat Komite Audit} = \text{Jumlah Pertemuan anggota komite audit dalam 1 tahun}$$

b. Variabel Dependenden

Variabel dependen atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel terikat. Menurut (Ulfa, 2019) Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang secara struktur berpikir keilmuan menjadi variabel yang disebabkan oleh adanya perubahan variabel lainnya. Dengan demikian, variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laba. Kualitas laba yaitu penilaian sejauh mana laba (*sustainable earning*) dimasa depan serta dapat mencerminkan kinerja keuangan sesungguhnya. Dalam penelitian ini, kualitas laba diukur dengan menggunakan pendekatan discretionary accrual sebagai proksi kualitas laba yang dihitung dengan menggunakan Modified Jones Model. Model ini digunakan karena dinilai merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba. Untuk mendapatkan nilai Discretionary Accrual dapat dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghitung nilai Total *Accrual* (TAC)

$$TAC_{it} = Nit - CFO_{it}$$

Keterangan :

- a) TAC_{it} = Total *Accrual* perusahaan i pada periode t
 - b) Nit = Laba bersih perusahaan (*net income*) perusahaan i pada periode t
 - c) CFO_{it} = Arus kas operasi perusahaan (*cash flow from operating activities*) perusahaan i pada periode t
2. Nilai Total *Accrual* (TAC) yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\left(\frac{TA_{it}}{A_{it-1}}\right) = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}}\right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}}\right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}}\right) + \epsilon$$

Keterangan :

- a) TAC_{it} = Total *Accrual* perusahaan i pada periode t
- b) A_{it-1} = Total Aset perusahaan i pada periode t-1
- c) ΔREV_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan i antara periode t dan periode t-1
- d) PPE_{it} = Nilai aset tetap perusahaan i pada periode t

3. Menghitung Nilai *Nondiscretionary Accruals* (NDA) :

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}}\right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta REC_{it}}{A_{it-1}}\right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}}\right)$$

Keterangan :

- a) NDA_{it} = *Non Discretionary Accruals* (NDA) perusahaan i pada periode t
- b) A_{it} = Total aset perusahaan i pada periode t
- c) ΔREV_{it} = Perubahan pendapatan perusahaan i antara periode t dan periode t-1
- d) ΔREC_{it} = Perubahan piutang perusahaan i antara periode t dengan periode t-1
- e) PPE_{it} = Nilai aset tetap perusahaan i dengan periode t

4. Menghitung *Discretionary Accrual* (DA) dengan persamaan berikut :

$$DAC_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Keterangan :

- a) DAC_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode t
- b) A_{it} = Total aset perusahaan i pada periode t

- c) TA_{it} = *Total Accrual* perusahaan i pada periode t
- d) NDA_{it} = *Non Discretionary Accruals* (NDA) perusahaan i pada periode t

3.4 Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel independen terhadap industri yang mengalami permasalahan keuangan dibandingkan dengan yang sehat secara keuangan.

a. Statistik Deskriptif

(Sugiyono, 2017) mendefinisikan statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bertujuan untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai karakteristik komite audit pada perusahaan Manufaktur (sub sektor makanan dan minuman) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Model statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Nilai maksimum yaitu nilai tertinggi dari setiap variabel penelitian
- 2) Nilai minimum yaitu nilai terendah dari setiap variabel penelitian
- 3) Nilai rata-rata (*mean*) yaitu nilai rata-rata setiap variabel penelitian
- 4) Standar deviasi yaitu nilai statistik yang digunakan untuk menentukan sebaran data dalam sampel. Semakin kecil sebarannya ini berarti variasi nilai data mendekati sama. Semakin besar sebarannya ini berarti data semakin bervariasi

b. Uji Asumsi Klasik :

1) Uji Normalitas

Ghozali (2017:145) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang dianggap baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji statistik yang digunakan untuk menilai normalitas dalam penelitian ini adalah uji Jarque Bera (JB) dengan histogram-normality test. Dengan tingkat signifikansi 5%, indikator yang digunakan untuk pengambilan keputusan bahwa data tersebut terdistribusi normal atau tidak adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai probabilitas lebih besar ($>$) dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal.
- b. Apabila nilai probabilitas lebih kecil ($<$) dari 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

2) Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah hubungan linier antar variabel bebas. (Ghozali, 2017) menyatakan bahwa uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi diantara variabel. Bila ada korelasi yang tinggi diantara variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat menjadi terganggu. Ghozali (2017:73) menyatakan dengan tingkat signifikansi 90%, adanya multikolinieritas

antar variabel independen dapat dideteksi dengan menggunakan matriks korelasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai matriks korelasi antar dua variabel independen lebih besar dari ($>$) 0,90 maka terdapat multikolinearitas.
- b. Jika nilai matriks korelasi antar dua variabel independen lebih kecil ($<$) 0,90 maka tidak terdapat multikolinearitas.

3) Uji Heterokedastisitas

(Ghozali, 2017) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain konstan maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang dianggap baik adalah residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang konstan atau homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji statistik yang digunakan untuk menilai heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah uji Breusch Pagan. Ghozali (2017:90) menyatakan bahwa uji Breusch Pagan dapat dilakukan dengan meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen lain. Dengan tingkat signifikansi 5%, adanya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas variabel independen lebih besar ($>$) dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai probabilitas variabel independen lebih kecil ($<$) dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

(Ghozali, 2017) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Salah satu uji formal yang paling populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (DW), dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah:

- a. Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau *upper bound* (d_U) dan ($4-d_U$) maka koefisien autokorelasinya sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- b. Bila DW lebih rendah dari batas bawah atau *lower bound* (d_L) maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
- c. Bila DW lebih besar dari ($4-d_U$) maka koefisien autokorelasinya lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi.
- d. Bila nilai DW terletak antara batas atas (d_U) dan bawah (d_L) atau DW terletak antara ($4-d_U$) dan ($4-d_L$) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

c. Analisis Regresi Linear Berganda

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda (*multiple regression*) untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan skala pengukuran interval atau

rasio dalam suatu persamaan linear. Menurut (Sugiyono, 2016) Analisis regresi linear berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen.

Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis akan dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laba

A = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = koefisien Regresi

X1 = ukuran komite audit

X2 = Independensi komite audit

X3 = Jumlah rapat komite audit

e = Kesalahan Prediksi (*error*)

d. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan uji koefisien determinasi dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t).

1) Uji koefisien determinasi (*goodness of fit test*)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan modal dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi menunjukkan persentase pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam *adjusted R square* (R^2).

2) Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian adalah :

- a) H_0 diterima jika nilai probabilitas ($\text{sig } t$) $> \alpha$ (0,05) dan p value $> 0,05$
- b) H_0 ditolak jika nilai probabilitas ($\text{sig } t$) $< \alpha$ (0,05) dan p value $< 0,05$

